

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN JEPARA

Pravidya Ariya Adicita

NPP. 29.0837

Asal Pendaftaran Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email : pravidyarettoazura@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In early 2020, the Covid-19 pandemic became a worldwide problem. There are even governments in the world who are overwhelmed with the spread of this virus. One of the impacts caused by the Covid-19 pandemic is the economic factor. In Indonesia, the community's economy is declining. To overcome this, the efforts made by the Indonesian government are to provide direct cash assistance to the affected communities. To overcome this, the Village Fund budget was transferred to a cash assistance fund called the Village Fund Direct Assistance (BLT Dana Desa). The implementation of this program in terms of its effectiveness still invites many questions. **Purpose :** The purpose of this research was to see the effectiveness of the Village Fund Direct Cash Assistance program which was carried out during 2021. This research was conducted at the Social and Village Empowerment Office of Jepara Regency, Central Java Province. **Method :** The researcher carried out research activities using descriptive qualitative methods with Mahmudi's theory of effectiveness which explained various dimensions, namely input, throughput, output, and outcome. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Research findings indicate that the implementation of Village Fund Cash Direct Assistance during the Covid-19 pandemic in Jepara Regency was effective based on effectiveness according to Mahmudi (2016). **Result :** There are obstacles that the authors get on input and throughput, which consist of duplicate data so that it is necessary to replace KPM data, lack of public awareness, and less than optimal socialization carried out. Efforts are being made by re-collecting data, monitoring, and making regulations. **Conclusion :** The results show that the effectiveness of this program for the poor is felt to be very beneficial for them, and most of the community supports the program carried out by the central government.

Keywords: Effectiveness; BLT; Village Fund; Covid-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Awal tahun 2020, pandemi *Covid-19* menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintahan di dunia bahkan ada yang kewalahan mengatasi penyebaran virus ini. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemi *Covid-19* adalah faktor perekonomian. Di Indonesia perekonomian masyarakat menjadi menurun untuk mengatasi hal itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terkena dampak. Untuk mengatasi hal itu anggaran Dana Desa dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). **Tujuan :** Pelaksanaan program ini dari sisi efektivitasnya masih banyak mengundang pertanyaan, Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilaksanakan selama tahun 2021. Penelitian ini dilakukan di adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. **Metode :** Peneliti melakukan kegiatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori efektivitas dari Mahmudi di mana menjelaskan berbagai dimensi yaitu *input*, *throughput*, *output*, dan *outcome*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi sistematis, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. **Hasil Temuan :** penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Jepara berjalan efektif berdasarkan efektivitas menurut Mahmudi (2016). Terdapat hambatan yang penulis dapatkan pada *input* dan *throughput* yaitu terdiri dari data ganda sehingga diperlukan penggantian data KPM, Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, dan kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan ulang, *monitoring*, dan pembuatan regulasi. **Kesimpulan :** menunjukkan efektivitas program ini bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas; Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD); Covid-19

I . PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses penyelenggaraan pemerintahan adalah suatu proses penyelenggaraan yang di dalamnya ada aparatur pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan melaksanakan dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki urusan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan mereka sendiri hal ini dinamakan otonomi daerah, Pemberian otonomi daerah yang luas bertujuan untuk meningkatkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2019, seluruh dunia dihebohkan dengan menyebarnya *Corona Virus Disease (Covid-19)* di China. Virus ini kemudian menyebar ke seluruh negara di dunia. Pada Maret 2020, Indonesia terdapat *Covid-19*. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Pandemi *Covid-19* ini menyebabkan pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk mencegah penyebaran virus seperti penerapan *Work From Home (WFH)*, pembelajaran secara daring, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan berbagai upaya yang lainnya. Sedangkan adanya kebijakan tersebut maka berdampak pula kepada perekonomian masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan seperti pedagang yang berkurangnya jumlah pembeli, karyawan swasta yang dirumahkan sementara atau bahkan diberhentikan, dan masih banyak sektor lapisan masyarakat lainnya yang terdampak oleh pandemi *Covid-19*. (Neuman, Lawrence. 2014).

Berdasarkan situasi Pandemi *Covid-19* yang semakin tidak terkontrol, Pemerintah memutuskan untuk menggunakan anggaran dana desa pada tahun 2020 adalah Rp 71,19 miliar. Sedangkan adanya program tersebut untuk memenuhi kebutuhan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), 4.444 transaksi dialokasikan hingga 2030% dari total dana desa. Adapun untuk Pelaksanaan BLT-DD dapat dilaksanakan minimal enam bulan, dan sasaran penerima manfaat adalah keluarga. Pada tahun 2021, adapun Tiga fokus utama untuk Dana Desa pada tahun 2021. Pertama, memulihkan perekonomian nasional (PEN) sesuai dengan kewenangan rakyat. Kedua, sesuai dengan kewenangan kota, rencana prioritas nasional baik Teknologi Informasi dan Pariwisata. Terakhir adalah beradaptasi dengan kebiasaan baru yaitu keamanan kampung *Covid-19*. Penggunaan dana desa untuk pandemi *Covid-19* ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagaimana dari penjelasan yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa arah kebijakan dari Dana Desa fokus utama atau prioritasnya tertuju pada kesejahteraan masyarakat desa dengan

mengurangi tingkat kemiskinan melalui pembinaan masyarakat desa atau pemberdayaan masyarakat desa.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data yang diperoleh di atas bahwa pelaksanaan BLT Dana Desa masih ditemukan adanya beberapa Keluarga penerima Manfaat (KPM) yang belum mendapat pembagian BLT-DD. Hal ini diperkuat bahwa Dari 184 desa 133 di antaranya sudah rampung menyalurkan BLT-DD bulan III Sisanya masih menunggu minimal setelah penyaluran tahap sebelumnya.

Penulis mengidentifikasi ditemukannya masalah berupa masih adanya desa di Kabupaten Jepara, yang belum menerima pencairan BLT-DD dikarenakan adanya kendala yang terjadi. Masih adanya data yang tumpang tindih atau data gblu yang ditemukan, dan Penyaluran BLT-DD yang tidak tepat waktu.

Beberapa permasalahan di atas penulis tertarik menulis skripsi ini karena menurut penulis BLT-DD sangat besar pengaruhnya dalam membantu masyarakat di desa. Apabila Bantuan Langsung Tunai ini dikelola dengan baik dan benar, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan yang membutuhkan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai atau yang lainnya. Penelitian Anri Fauzan Rangkuti Strategi Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dana Bantuan Langsung Tunai Covid-19 di Kabupaten Mlbuiling Natal , menemukan bahwa Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai sudah sangat baik dan dapat ditingkatkan lagi.. Penelitian Auliyana Sari menemukan bahwa Implementasi Penyaluran Program BLT sudah dilaksanakan dengan baik. Penelitian Heri Gunawan menemukan bahwa Strategi Dinas Sosial kota dalam mengemban tugasnya Sudah berjalan dengan baik atau bisa dikatakan efektif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana konteks penelitian yang dilakukan yakni Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jepara, dari fokus teori dan metodenya yang digunakan juga berbeda dengan penelitian Anri Fauzan, Auliyana, dan Heri Gunawan. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Mahmudi yang menyatakan bahwa efektivitas didapatkan dari output dan outcome.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Jepara terutama dalam efektivitas yang diperoleh masyarakat dalam penggunaan dana BLT-DD ini.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan melakukan wawancara, dokumentasi, serta observasi (Arikunto, Suharsimi. 2010).

Penulis mengumpulkan wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif menurut Sugiyono. 2009, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri Kepala Dinas Sosial Pemasaryakatan dan Desa, Sekretaris Dinas, Kabid, Kasi, Kepala Desa dan Penerima Bantuan (KPM). Penulis menggunakan data yang berasal dari apa yang terjadi dan apa yang diperoleh dengan memadukan konsep teori Efektivitas oleh Mahmudi, yang di dalamnya terdapat beberapa hal yang terkait seperti indikator input, throughput, output, dan outcome.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 PENGUKURAN DALAM EFEKTIVITAS Penulis juga memproses data dari realisasi selama 12 bulan yang dianalisis berdasarkan runtut waktu yaitu dari bulan 1 (Januari) – 12 (Desember) 2021 yang diolah dari data yang diperoleh bahwa suatu efektivitas dapat diukur dari jumlah penyaluran yang terkait dengan rumus sebagai berikut :

Efektivitas = (Outcome / Output) x 100%

Dengan ketentuan adalah sebagai berikut : (Indrawati. 2017.)

1. Nilai kurang dari 40% ($x < 40\%$) berarti sangat tidak efektif.
2. Nilai kurang dari 60% atau lebih dari sama dengan 40% berarti tidak efektif.
3. Nilai kurang dari 80% atau lebih dari sama dengan 60% berarti cukup efektif.
4. Nilai lebih dari sama dengan 80% berarti sangat efektif.

Tabel berikut akan diukur tingkat efektivitas yang diukur berdasarkan Output dan Outcome yang tercapai (Mardiasmo. 2009)

Tabel 3. 1 Tingkat Efektivitas

Bulan	Outcome (KPM)	Output (KPM)	Persentase (%)	Efektivitas
1	15.299	15.546	98	Efektif
2	15.262	15.546	98	Efektif
3	15.181	15.546	98	Efektif
4	15.105	15.546	97	Efektif
5	15.030	15.546	97	Efektif
6	14.907	15.546	96	Efektif
7	14.875	15.546	96	Efektif
8	14.857	15.546	96	Efektif
9	14.812	15.546	95	Efektif
10	14.598	15.546	94	Efektif
11	14.597	15.546	94	Efektif
12	12.731	15.546	82	Efektif

Sumber : diolah oleh penulis

Berdasarkan data di atas yang telah diolah oleh peneliti bahwa didapatkan di Jepara secara keseluruhan sudah sangat efektif dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Hal ini dapat ditentukan bahwa dalam pelaksanaan yang telah terjadi selama 12 Bulan mengalami tren penurunan namun hal ini masih sangat efektif karena masih di atas batas yang telah ditentukan.

Pada hal ini banyak masyarakat yang terbantu, di mulai dari masyarakat yang menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan pribadi atau sehari-hari

dan kebutuhan untuk memutar modal dalam waktu tertentu seperti untuk berusaha.

3.2 Faktor - Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Jepara pada khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa-desanya di Kabupaten Jepara telah melakukan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, namun tidak dipungkiri bahwa masih banyak hambatan-hambatan yang membuat terjadinya kendala pada kegiatan BLT-DD di Kabupaten Jepara.

1. Terdapat Data Ganda Sehingga Diperlukan Penggantian Data KPM. Data ganda adalah data yang tumpang tindih di mana dalam suatu nama terdapat beberapa bantuan yang diperoleh dari orang tersebut dengan kata lain orang itu akan mendapatkan *double* bantuan atau bantuan berlebih salah satunya adalah dengan data bantuan milik kementerian sosial.

Tabel 3.2 Tabel Data Ganda

Jenis	Jinggotan	Kancilan	Pendem
Jumlah Data Ganda (Orang)	25	27	29
Jumlah Real BLT-DD (Orang)	15	25	22

Sumber : Diolah oleh penulis

Dapat disimpulkan bahwa hal yang dilakukan terhadap situasi dan kondisi menjadikan KPM mengalami tumpang tindih. Dimana dalam rangka memenuhi tuntutan untuk menyejahterakan masyarakat banyak kepala desa yang melakukan penggantian data KPM secara berkala dengan maksud agar seluruh warganya yang memang secara kriteria telah sesuai dapat mendapatkan bantuan BLT-DD.

2. Adanya Kekurangan Tingkat Kesadaran Masyarakat.

Masih banyak masyarakat yang tingkat kesadarannya masih rendah di mana mereka yang sudah mendapatkan bantuan lain masih tetap mengusahakan untuk mendapatkan BLT-DD sehingga masyarakat yang memang seharusnya berhak menerima BLT-DD justru tidak mendapatkan bantuan tersebut karena sebagaimana yang telah diatur bahwa syarat penerima BLT-DD diperuntukkan bagi mereka yang belum menerima bantuan lain selain BLT-DD. Untuk melihat hal ini dapat dilihat pada tabel tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara

Tabel 3.3 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jepara

No.	Tahun	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	2019	386.693	6,66
2	2020	407.056	7,17
3	2021	419,028	7,44

Sumber : diolah oleh penulis

3. Kurang Optimalnya Sosialisasi Yang Dilakukan.

Berdasarkan hal ini pemerintah desa dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum maksimal dalam melakukan sosialisasi mengenai penyaluran Bantuan Langsung Dana Desa. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang akan menuntukan arah dan kebijakan dalam mengembangkan suatu usaha. Semakin baik kualitas sumber daya manusia nya semakin baik pula manajemen usaha yang diterapkan sehingga akan berdampak baik terhadap perkembangan perusahaan/institusi.

Tabel 3.4 Data Pegawai di Desa Jinggotan, Kancilan dan Pendem

No.	Tingkat Pendidikan	Desa Jinggotan	Desa Kancilan	Desa Pendem
1	SD	1	0	1
2	SMP	0	1	3
3	SMA	7	9	7
4	S1	5	4	2
5	Jumlah	13	14	13

Sumber : diolah oleh penulis

Hal ini dilontarkan juga oleh Kepala Desa Jinggotan bapak Sholikin, menjelaskan bahwa Kami merasa masyarakat masih belum tahu seperti apa dan bagaimana pembagian mengenai BLT-DD sehingga kami merasa

perlu memberikan sosialisasi kepada pegawai, pihak yang diundang, dan masyarakat. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa mengakibatkan banyak aparat dan juga masyarakat yang belum sepenuhnya memahami secara utuh bagaimana mekanisme program BLT-DD sehingga banyak terjadi penyelewengan di lapangan yang tidak sesuai dengan SOP yang ada.

3.3 Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara

Menindaklanjuti hambatan dari faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Jepara dengan mempertimbangkan faktor pendukung yang dimiliki, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan Penetapan Dan Verifikasi data BLT-DD Secara Berkala

Melihat bantuan yang cukup banyak telah diberikan pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat sehingga terjadi cukup banyak kesalahan maka dibutuhkan upaya dalam menetapkan data penerima bantuan langsung tunai dana desa. Adapun diperlukan upaya oleh Dinas Sosial Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Desa untuk menetapkan data penerima bantuan langsung tunai dana desa secara real, sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

NO	DESA	NAMA	DESA	KEMERIAL	TANDA TANGAN
1	1320148210910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	
2	1320148410910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	
3	13201481210910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	
4	13201481210910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	
5	13201481210910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	
6	1320148410910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	
7	1320148410910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	
8	1320148410910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	
9	13201481210910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	
10	13201481210910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	
11	13201481210910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	
12	13201481210910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	
13	13201481210910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	
14	13201481210910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	
15	13201481210910002	DIKIR	20081000-INGGOTAN	900000	

Tanggal: 25 400000

Belum Teratur:

Mengetahui:
Petinggi / Sekretaris Desa
BIBIK ARDIYANINGSIH

Petugas:
Sita Ayu Andika

Gambar 3.1 Data Penerima KPM

Berdasarkan wawancara diatas sebagai pelaksana program pemerintah desa memang sangat bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk dapat menyalurkan bantuannya ke masyarakat yang memang membutuhkannya.

Dengan bantuan BLT-DD ini, desa diberi tanggungjawab untuk menentukan penerima bantuan yang tepat. Karena pada program bantuan yang lain yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, masih belum dapat menjangkau semua masyarakat yang ada di desa. Sehingga dengan program BLT-DD ini mendorong desa untuk menunjukkan kemampuannya dalam rangka mengelola bantuan secara lebih baik. Sehingga pendataan dapat dilakukan secara transparan karena masyarakat juga ikut melihat proses pendataan yang dilakukan.

2.Adanya Fasilitas dan Pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara.

Penyaluran bantuan langsung tunai juga memerlukan fasilitas dan pengawasan untuk bantuan dapat disalurkan dengan efektif dan efisien serta tepat sasaran. Karena dengan jumlah anggaran yang dialokasikan cukup besar maka penyaluran harus dapat diberikan kepada orang yang tepat:

Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Laptop	25
2	Komputer	20
3	Mobil	15
4	Motor	20
5	Printer	15
6	Meja	50
7	Kursi	120
9	Lemari Besi	20
10	Lemari Kayu	30

Sumber : diolah oleh penulis

Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Taufik S.STP, M.M selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara menjelaskan bahwa Kami telah melakukan kegiatan berupa *monitoring* kepada desa-desa yang memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga kami dapat mengecek dan menunggu laporan yang sesuai dengan laporan yang didapat dan hasil yang dilakukan. Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah berupaya untuk melakukan *monitoring* terhadap kegiatan BLT-DD.

3. Membuat Regulasi Mengenai Penyaluran BLT-DD.

Pada hal ini dibuat regulasi tiap desa. Dalam hal ini peraturan petinggi (Kepala Desa) dalam proses pembagian bantuan kepada masyarakat.

Hal ini dituturkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Desa menjelaskan bahwa Semua upaya terbaik telah kami lakukan salah satunya dengan memberikan kewajiban untuk setiap Petinggi (Kepala Desa) untuk membuat regulasi mengenai penyaluran BLT-DD berupa Peraturan Petinggi. Sedangkan menurut kepala desa Jinggotan bapak Sholikin menjelaskan bahwa kami mengenai pembagian BLT-DD ini sudah membuat peraturan petinggi sehingga ada dasar hukum yang dapat kami pedomani.

Hal senada juga dijelaskan oleh kepala desa Kancilan bapak Yuswoto bahwa Dalam pembagian BLT-DD ini kami membuat peraturan petinggi sehingga tidak keluar dari tujuan dan legalitas. Wawancara dengan Kepala Desa Pendem bapak Ismail kami dalam pembagian ini berpedoman juga dengan peraturan petinggi.

Tabel 3.6 Peraturan Petinggi Mengenai BLT-DD

No	Regulasi	Tentang
1	Peraturan Petinggi Jinggotan No. 2 tahun 2021	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kepada Masyarakat Penerima Manfaat Akibat Pandemi Covid-19
2	Peraturan Petinggi Kancilan No. 2 Tahun 2021	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kepada Masyarakat Penerima Manfaat Akibat Pandemi Covid-19
3	Peraturan Petinggi Pendem No. 3 Tahun 2021	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kepada Masyarakat Penerima Manfaat Akibat Pandemi Covid-19

Sumber : Diolah oleh penulis

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya mengenai pelaksanaan BLT-DD baik itu dengan verifikasi data, monitor dan fasilitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara, dan Penguatan regulasi dari dibentuknya peraturan petinggi sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan BLT-DD.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan BLT-DD selama masa pandemi Covid-19 Di Kabupaten Jepara memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat

dalam rangka meningkatkan Ekonomi masyarakat di Kabupaten Jepara. Sebagai salah satu cara membantu masyarakat yang terdampak covid-19 di kabupaten Jepara. Namun terdapat kekurangan yang didapatkan yaitu kurang maksimalnya program bantuan yang telah diberikan, data ganda dan tingkat keefektifitasan pembagian BLT-DD di masyarakat. Terdapat hambatan yang penulis dapatkan pada *input* dan *throughput* yaitu terdiri dari data ganda sehingga diperlukan penggantian data KPM, Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, dan kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan ulang, *monitoring*, dan pembuatan regulasi. Hasilnya menunjukkan efektivitas program ini bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jepara yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, penulis dapat menarik kesimpulan adalah Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mencapai nilai yang sangat efektif yaitu pada dimensi *Output* dan *Outcome*, hanya saja terdapat beberapa kendala dan masalah yang dihadapi dalam proses pembagian BLT-DD ditemukan pada beberapa dimensi yaitu tepatnya *Input* dan *Throughput*. Tingkat efektivitas dapat dicek dalam pelaksanaan *output* dan *outcome* sudah bermanfaat dan sudah dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat pada tabel pembahasan yang ada. Terdapat hambatan yang penulis dapatkan pada *input* dan *throughput* yaitu terdiri dari data ganda sehingga diperlukan penggantian data KPM, Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, dan kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan. Adapun upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Melakukan Penetapan dan Verifikasi data BLT-DD secara berkala, Adanya fasilitas dan pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara, dan Membuat regulasi mengenai penyaluran BLT-DD.

Penulis mempunyai saran dalam meningkatkan efektivitas penyaluran BLT-DD yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara hendaknya dapat mempertahankan dan melanjutkan kebijakan serta langkah-langkah yang telah diambil seperti peningkatan ketepatan waktu agar masing-masing desa di wakili oleh perangkat desa menjemput ke Kecamatan Kembang lalu memberikan laporan, dan petunjuk kepada pihak terkait agar sasaran pembagian, penentuan sasaran dapat menghindari praktik pilih kasih atau memanfaatkan orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan pribadi serta jumlah yang dapat dipastikan dapat dibagi dalam kurun waktu tertentu dalam upaya pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa yang di nilai sudah efektif.

Keterbatasan Penelitian : Salah satu keterbatasan penulis hanya dapat menggunakan 3 Desa dalam menentukan tingkat efektivitas secara mendalam, sisanya pada satu Kabupaten hanya berupa data.

Arah Masa Depan Penulisan : Penulis menyadari bahwa kedepan dapat terus berkembang karena dalam pelaksanaan ini terjadi pada tahun 2021 dikarenakan akan terjadi perkembangan lebih.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Seluruh pihak yang telah membantu terkhusus Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara, dan segenap pihak terkait yang telah membantu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indrawati. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Neuman, Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. New York: Pearson.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

